

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BKM PLOSO MAJU SEJAHTERA KOTA SURABAYA

Nur Handayani^{1*}, Susanti²

**¹STIESIA Surabaya, ²STIESIA Surabaya
nurhandayani@stiesia.ac.id¹, susanti@stiesia.ac.id²**

Abstrak: *BKM (Badan keswadayaan Masyarakat) merupakan suatu lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif ditingkat desa/kelurahan. Peran BKM sebagai lembaga masyarakat yaitu menyalurkan program-program pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pendekatan partisipatif. BKM secara khusus ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, dan secara umum ditujukan untuk pembangunan masyarakat kelurahan. BKM memiliki potensi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena BKM secara tidak langsung merupakan manifestasi dari masyarakat itu sendiri sehingga lebih memahami permasalahan sosial di masyarakat sekitarnya. Hasil survey lapangan yang diperoleh adalah Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BKM PLOSO MAJU BERSAMA kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari kota Surabaya disusun berdasarkan Nilai Historis untuk pos piutang, aset tetap serta pendapatan dan beban. Terdapat adanya salah catat dan salah jumlah. Permasalahan sumber daya manusia yang ada belum memadai dari sisi kuantitas dan kompetensinya. Selain itu, pengurus yang bertugas juga belum semuanya aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebaiknya BKM PLOSO MAJU BERSAMA mengoptimalkan fungsi sumberdaya manusia.*

Kata Kunci: BKM, Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Optimalisasi Kesekretariatan

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah akan menyebabkan suatu kondisi dimana penduduknya mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan juga menyebabkan kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, pembiayaan kesehatan karena minimnya pendapatan yang diperoleh. Pemerintah berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dengan membentuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). P2KP merupakan program memberdayakan masyarakat miskin melalui usaha bersama masyarakat dengan melibatkan pemerintah setempat dan pihak swasta secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk menangani program tersebut, ditingkat kelurahan dibentuk kelembagaan masyarakat yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Fungsi BKM untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi masalah kemiskinan melalui program pemberdayaan dari pemerintah, agar mereka mampu melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. BKM merupakan suatu lembaga masyarakat yang

berbentuk paguyuban dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif ditingkat desa/kelurahan. Peran BKM sebagai lembaga masyarakat yaitu menyalurkan program-program pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pendekatan partisipatif.

BKM secara khusus ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, dan secara umum ditujukan untuk pembangunan masyarakat kelurahan. BKM memiliki potensi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena BKM secara tidak langsung merupakan manifestasi dari masyarakat itu sendiri sehingga lebih memahami permasalahan sosial di masyarakat sekitarnya. Dengan adanya BKM sebagai lembaga masyarakat, sebagai pihak penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan, diharapkan mampu membangun modal sosial dalam suatu masyarakat agar setiap program bantuan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain itu BKM sebagai lembaga kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu merangkul serta mengayomi masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahannya. Untuk membantu melaksanakan tugasnya, BKM sendiri membentuk Tim pelaksana untuk membantu dalam setiap kegiatan pembangunan, yakni Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BKM juga diwajibkan untuk membuat laporan keuangan atas kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Dana yang diterima oleh BKM menuntut BKM harus siap dan mampu mengelola keuangan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, efisiensi (Dewanti, 2015; Kartika, 2012) sebagai perwujudan akuntabilitas kepada negara dan publik.

Praktek yang ada dilapangan sehubungan dengan bantuan pinjaman bergulir yang dikelola BKM adalah kurangnya rasa tanggungjawab masyarakat untuk mengembalikan pinjaman (Wira dan Gustati, 2014). Persepsi yang ada dimasyarakat pinjaman dana yang diterima merupakan subsidi pemerintah. Adanya pinjaman bergulir yang macet tidak terlepas dari tanggung jawab BKM dan UPK dalam pengelolaan dan pengawasan dana bergulir. Ini membuktikan rendahnya tanggungjawab BKM dan UPK sebagai pengelola dan pengawas.

Pinjaman bergulir yang macet merupakan tanggung jawab BKM dan UPK dalam pengelolaan dan pengawasan dana bergulir. Banyaknya pinjaman yang macet membuktikan rendahnya tanggungjawab BKM dan UPK sebagai pengelola dan pengawas. Hal ini akan berdampak pada penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu menjadi tidak tercapai. Banyak BKM dan UPK yang berhadapan dengan kendala pinjaman macet seperti terjadi di 12 (Dua belas) kelurahan di Palembang (Welly, 2016; Yusrianti, 2011), Malang dengan 134 BKM (Yuliati, Sudarma, & Kamayanti, 2012), Sumatera Barat (Wira & Gustati, 2014), Samarinda (Ngumar, 2012).

Nafidah dan Anisa (2017) menemukan adanya beberapa kendala teknis yang ada di desa untuk mewujudkan akuntabilitasnya seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran. Diansari (2016) mengatakan bahwa terdapat kendala akuntabilitas pada BKM yang disebabkan oleh terbatasnya kualifikasi aparatur perangkat desa, tata kelola keuangan yang lemah dan pengawasan yang terbatas.

Ngumar dan Fidiana (2018) mengemukakan bahwa kompetensi pengurus dan pengelola KSM bahkan UPK secara umum masih rendah. Para pengurus biasanya dipilih berdasarkan

statusnya sebagai tokoh masyarakat, bukan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan peran dan latar belakang pendidikan. Hal ini menjadi penyebab ketiadaan dan keterlambatan dalam pelaporan keuangan yang merupakan masalah umum dan klasik karena mereka awam terhadap proses akuntansi.

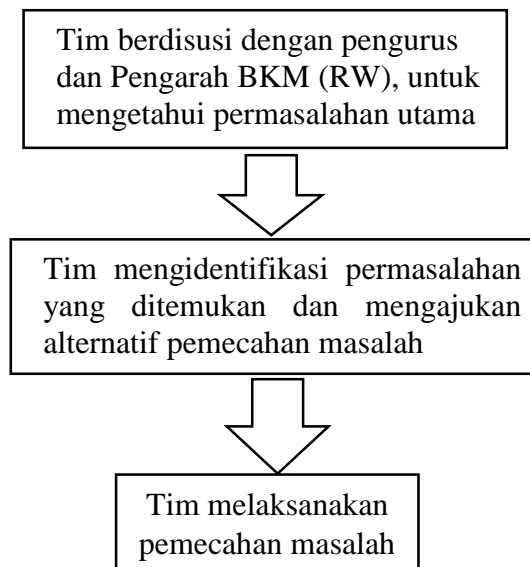
Berdasarkan observasi dilapangan, BKM Ploso Maju Bersama yang beralamatkan di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya sebagai salah satu Badan Pimpinan Kolektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang masih mengalami kendala dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas keuangan. BKM Ploso Maju Bersama didirikan masyarakat secara musyawarah, yang bergerak dibidang fisik/lingkungan, sosial dan ekonomi produktif. Kegiatan ekonomi produktif dengan memberi kredit lunak dengan bunga 1,5% per bulan dengan sistem tanggung renteng. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk oleh masyarakat sendiri untuk bisa melakukan kegiatan lingkungan, sosial, dan melakukan simpan pinjam dan mengajukan kredit usaha di BKM. Dana awal yang diperoleh dari pemerintah digunakan sebagai modal awal yang selanjutnya dikelola oleh manajemen sebagai pengurus BKM.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu membantu dan mendampingi dalam menyelesaikan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilakukan oleh pengurus, pengelola dan pengawas BKM.

Berdasarkan temuan audit Tahun 2018 permasalahan yang dihadapi BKM Ploso Maju bersama dalam hal manajemen kas, tidak tertib administrasi, belum sepenuhnya melakukan prosedur akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang tidak tepat waktu. Sehubungan dengan adanya kewajiban dari BKM untuk melakukan pertanggungjawaban pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan kepada publik secara transparan dan akuntabel maka diharapkan BKM Ploso Maju Bersama dapat melakukan pengelolaan keuangan dalam hal ini pinjaman bergulir sehingga perlu adanya pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan kepada publik.

2. METODE PELAKSANAAN

Bentuk Pengabdian Masyarakat dalam pendampingan penyusunan laporan Keuangan BKM Ploso Maju Sejahtera Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya menggunakan metode survey lapangan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam survey lapangan yaitu:



Gambar 1. Tahapan Metode Pelaksanaan

Tujuan dari survei lapangan yaitu untuk mencari informasi data yang berkaitan dengan pertanyaan sehingga dapat mengungkap fenomena yang ada secara faktual dan terperinci. Sumberdata dan informasi utamanya diperoleh dari informan melalui wawancara terstruktur dan mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah : Bpk Maryadi yang menjadi Ketua BKM Ploso Maju Sejahtera.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pada sub bab ini, ada dua bagian yang akan dideskripsikan oleh tim yaitu hasil survey lapangan di bagian pertamanya dan pembahasannya dibagian kedua. Hasil berisi tentang kondisi dan permasalahan yang ada di BKM Ploso Maju Sejahtera.

3.1. HASIL

Pada tahap pertama survey lapangan, hasil diskusi tim dengan ketua BKM dan Pengarah BKM (RW) untuk mengidentifikasi permasalahan utama diperoleh data sebagai berikut:

I. Proses Akuntansi

- a. Masih terdapat kesalahan dalam melakukan pencatatan pembukuan. Hal ini terlihat pada masih ada pencatatan yang salah posting dan kesalahan dalam melakukan penjumlahan. yang disertai bukti-bukti pendukung.
- b. Buku kolektibilitasnya belum dijalankan dan dicatat untuk masing-masing kelompok, sehingga proses penyusunan laporan keuangannya membutuhkan waktu yang lebih lama.
- c. Manajemen kas belum dijalankan dengan baik. Hal ini terlihat pada adanya uang tunai lebih dari Rp 1.500.000 lebih dari 2 hari kerja pada UPK dan Sekretariat

II. Kegiatan Operasional

- a. Kegiatan operasional BKM berjalan dengan baik. Hanya saja pada tahun 2019 ditemukan pinjaman kolektif sebesar Rp 51.000.000 yang belum bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan ketua kelompok meninggal dunia dan tidak ada data tercatat (pembukuan), sehingga pengurus kesulitan untuk menelusurinya.
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam kepengurusannya, sehingga manajemen tertentu merangkap tugas.

Identifikasi permasalahan awal yang diperoleh tim di atas, ada dua hal yaitu: proses akuntansi dan kegiatan operasional BKM Ploso Sejahtera. Ada 3 permasalahan utama dalam proses akuntansi BKM Ploso Maju Sejahtera dan 2 permasalahan utama dalam kegiatan operasional BKM. Adapun foto kegiatan dalam identifikasi permasalahan awal adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Wawancara dengan Ketua dan pengarah BKM Ploso Maju Sejahtera
Sumber: Data Internal Tim

Selanjutnya setelah permasalahan utama ditemukan tim melakukan kunjungan ke kantor pengurus BKM Ploso Maju Bersama di Jalan Bogen No.4 Tambak Sari Surabaya. Tim melakukan penelusuran data keuangan (*cash flow*) yang dimiliki oleh BKM. Kegiatan di atas didokumentasikan seperti terlihat pada gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3. Penelusuran dan pengambilan data *cash flow* dengan Ketua BKM Ploso Maju Bersama
Sumber: Data Internal Tim

Data yang diperoleh tim adalah sebagai berikut:

- a. Data aliran kas masuk dan kas keluar dicatat per bulan. Laporan aliran kas masuk dan kas keluar terakhir yang dibuat oleh pengurus BKM pada periode April 2019.
- b. Adanya pengeluaran BOP yang digabungkan dengan pengeluaran UPK. Adapun Komposisi pengeluaran yang selama ini dipraktikkan BKM adalah: untuk UPK sebesar 50%, untuk kegiatan sosial 25 % dan untuk infrastruktur 25%.
- c. UPK yang ada dibawah payungnya BKM Loso Maju Bersama sebanyak 37 UPK dan setiap UPK beranggotakan 5 orang.
- d. Kegiatan UPK yang aktif dilaksanakan adalah kegiatan pinjaman bergulir

3.2 PEMBAHASAN

Selanjutnya, setelah tim menemukan permasalahan utama kemudian dilakukan pembahasan dan dicarikan solusi pemecahannya. Secara umum, Proses akuntansi berjalan lancar sehingga memudahkan proses audit. Indikator lancarnya proses akuntansi antara lain tersedianya laporan keuangan UPK dan Kesekretariatan. Demikian halnya dengan aktivitas BKM PLOSO MAJU BERSAMA juga mematuhi regulasi yang berlaku dan berusaha konsisten sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan BKM yang tercantum dalam Akte Pendirian BKM.

Adapun solusi pemecahan masalah yang diusulkan oleh tim adalah sebagai berikut:

I. Proses akuntansi

- a. Proses akuntansi yang ada pada BKM telah dilakukan dengan melakukan pencatatan pembukuan berupa pembukuan kas masuk dan kas keluar yang ada pada UPK dan Sekretariat. Proses pencatatan khususnya kegiatan UPK masih sering terjadi kesalahan. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesalahan dalam memasukan jumlah nominal, kesalahan dalam mencatat penerimaan maupun pengeluaran kas, kesalahan dalam melakukan penjumlahan dan adanya transaksi yang belum dicatat. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka pengurus BKM harus memikirkan tentang kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di BKM PLOSO MAJU BERSAMA yang belum memadai. Dampak lainnya yang timbul dari kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perangkapan tugas dalam melaksanakan pencatatan pembukuan dan fungsi kasir.
- b. UPK belum melakukan pencatatan pada buku kolektibilitas sehingga UPK belum dapat mencadangkan kerugian piutang sebaiknya pengurus BKM melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu dan periodik untuk masing-masing UPK berkaitan dengan pencatatan buku kolektibilitas. Dengan demikian akan memudahkan pengurus dalam penelusuran data keuangan.
- c. Masih terdapat uang kas tunai dengan jumlah lebih dari Rp 1.500.000 yang lebih dari 2 hari kerja tidak disetor ke Bank. Hal ini terjadi pada UPK maupun pada Sekretariat. Seharusnya UPK maupun Sekretariat tidak menyimpan uang kas yang melebihi jumlah tersebut lebih dari 2 hari. Uang kas tersebut harus disetorkan ke Bank dalam waktu 1x24 jam, untuk menghindari adanya kehilangan atau penyalahgunaan uang kas.
- d. BKM PLOSO MAJU SEJAHTERA menerapkan dan mematuhi Kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BKM disusun berdasarkan Nilai Historis antara lain sebagai berikut:
 1. Piutang Usaha
Kredit yang diberikan untuk kegiatan pengembangan usaha KSM harus dilunasi dalam waktu 10 bulan. Angsuran pokok dibayar berdasarkan kesepakatan dengan jasa/bunga dibayarkan setiap bulan hingga berakhirnya jangka waktu pinjaman.

2. Aset Tetap

Aset tetap dibayarkan sebesar Harga Perolehan dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan, semua pengorbana yang berhubungan dengan perolehan Aset Tetap dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi, penyusutan dilakukan dengan Metode Garis Lurus (*Straight Line Methode*) berdasarkan taksiran isi manfaat mulai dari laporan ini diterbitkan data atas Aset Tetap yang dimiliki sebelum di susutkan.

3. Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan berdasarkan *Cash Basis* meliputi:

- Pendapatan bunga dari KSM diakui pada saat bayar.
- Beban Operasional dicatat pada pos yang seharusnya (Buku Biaya dan Pendapatan).

- e. Berikut ini laporan keuangan BKM Ploso Maju Bersama yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019 dan Laporan Laba Rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Tabel 1. NERACA- BKM PLOSO MAJU BERSAMA

Per 31 Desember 2019

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Aset Lancar		Kewajiban	
Kas dan Setara Kas		Utang kpd Pihak Ketiga	-
Kas UPK	46.892.942	Dana Tanggung Renteng	56.733.179
Kas Kesekretariatan	20.525.334	Dana BOP	20.525.334
Bank Jatim (UPK)	398.460	Dana Alokasi Laba UPK	20.231.835
Bank Jatim	-	Jumlah Kewajiban	97.490.348
Bank Simpeda	-		
Titipan Dana di BKM	-	Ekuitas	
Bank Jatim (Kesekretariatan)	-	Modal awal P2KP	1.161.803.507
Piutang		Pemupukan Modal	(955.898.283)
Piutang KSM	1.271.545.150	Laba tahun lalu	40.463.669
Piutang ex UPP 1	155.437.000	Laba tahun berjalan	49.955.000
Piutang Lain-lain	-	Jumlah Ekuitas	296.323.893
Cadangan Kerugian Piutang	(1.100.984.645)		
Jumlah Aset Lancar	393.814.241		
Aset Tetap			
Inventaris Kantor	25.156.675		
Akumulasi Penyusutan	(25.156.675)		
Total Aset	393.814.241	Total Kewajiban dan Ekuitas	393.814.241

Sumber: Data Internal BKM

Tabel 2. LAPORAN LABA RUGI-BKM PLOSO MAJU BERSAMA

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

PENDAPATAN

Bunga Pinjaman KSM	Rp 70.375.000
Pendapatan Lain Kredit	Rp 5.380.000
Pendapatan Lain Non Operasional	Rp -

Pendapatan Bunga Bank
Total Pendapatan

Rp -
Rp 75.755.000

BIAYA-BIAYA

BOP ke Sekretaris	Rp 14.000.000
Biaya Transport	Rp -
Biaya Rapat	Rp -
Biaya Resiko Pinjaman	Rp -
Biaya Penyusutan	Rp -
Biaya Lain Operasional	Rp -
Biaya Non Operasional	Rp 11.800.000

Total Biaya

Rp 25.800.000

LABA

Rp 48.955.000

Sumber: Data Internal BKM

II. Kegiatan Operasional

- Ketiadaan pencatatan di UPK berdampak terhadap adanya permasalahan pada tahun 2019 pinjaman kolektif sebesar Rp 51.000.000 yang belum bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan ketua kelompok meninggal dunia dan tidak ada data tercatat (pembukuan), sehingga pengurus kesulitan untuk menelusurinya. Oleh karena itu, sebaiknya pengurus melakukan pengendalian internal dengan cara membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) pemberian pinjaman. Seperti contohnya: *form* isian pinjaman yang berisi data peminjam, jumlah pinjaman dan harus diotorisasi sebagai bentuk persetujuan dari pengurus BKM.
- Kompetensi sumberdaya manusia harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan serta pendampingan.
- Peningkatan kompetensi sumber daya ini tidak hanya sumber daya di UPK tetapi juga dibagian keuangan dan manajemen (pengurusnya). Hal tersebut dikarenakan pengurus yang bertugas juga belum semuanya aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun dokumentasi untuk memberikan solusi permasalahan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BKM Ploso Maju Bersama yang dilakukan oleh Tim ada pada gambar 4 berikut ini:



Gambar 4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BKM Ploso Maju Sejahtera

Sumber Data: Internal

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah laporan pengabdian kepada masyarakat di BKM Ploso Maju Bersama ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini khususnya kepada:

1. Ketua STIESIA Surabaya yang telah memberikan dukungan kebijakan, dan pengarahan dalam menyusun laporan kegiatan ini
2. LP2M STIESIA Surabaya yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini
3. Pengurus BKM Ploso Maju Bersama kalurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dan semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini

5. KESIMPULAN

Secara umum aktivitas BKM Ploso Maju Bersama yang dijalankan berusaha sesuai dengan akte pendirian BKM perihal maksud, tujuan dan kegiatan BKM. Demikian halnya dengan pengendalian internal, penerapan prosedur telah berjalan dengan cukup baik, karena ada pengawasan terhadap operasional BKM. Kondisi tersebut berdampak terhadap kelancaran proses akuntansi sehingga memudahkan proses audit. Indikator lancarnya proses akuntansi antara lain terdapatnya laporan keuangan UPK dan Kesekretariatan yang disertai bukti-bukti pendukung lengkap. Permasalahan utama yang ada terjadi pada proses akuntansi dan kegiatan operasional. Solusi atau alternatif pemecahan masalah yang diberikan dalam proses akuntansi adalah:

- a. Pencatatan transaksi keuangan harus cermat dan hati-hati agar tidak terjadi salah catat yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan.
- b. UPK sebaiknya tidak menyimpan uang kas tunai diatas Rp 1.500.000 lebih dari 2x24 jam batas penyimpanan 1x24 jam.
- c. UPK sebaiknya dapat membuat buku kolektabilitas, agar pembukuan UPK dapat mencadangkan kerugian piutang.

Solusi atau alternatif pemecahan masalah yang diberikan dalam kegiatan operasional adalah:

- a. Pada saat pengajuan proposal pinjaman sebaiknya dapat ditunjukkan buktinya, karena pada saat pinjaman dapat mendukung pembuktian pinjaman.
- b. Pengendalian internal dalam pemberian pinjaman harus dibuatkan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk memperkecil resiko terjadinya pinjaman yang tidak tertagih.
- c. Manajemen/pengurus sebaiknya segera menindaklanjuti temuan dari auditor.
- d. Keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki BKM Ploso Maju Bersama dari sisi jumlah dan kompetensinya sehingga memicu terjadinya salah catat dan salah saji dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara itu pengurus juga belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan pembinaan serta pendampingan yang dilakukan secara berkala dan kontinyu baik ditingkat UPK maupun pengurus/manajemennya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Dewanti, E.D.W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Diansari, R.E. (2016). Analisis Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Metode Logic Model. *Jurnal Akmenika* Vol. 13 No. 1.
- Kartika, R.S. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 3, pp. 179 – 188.
- Nafidah, L.N, & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntabilitas* Vol. 10 N0. 2.
- Ngumar, S. (2012) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Penerima Bantuan PNPM-Mandiri Perkotaan Samarinda. *Jurnal Eksis*, Vol. 8 No. 2, pp. 2168-2357.
- Ngumar, S & Fidiana. (2018). Realitas Akuntabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kota Batu. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol. 6 No. 2, , 151-161.
- Welly. (2016). Efektifitas Penyelenggaran Dan Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol. 7 No. 2, pp. 16-22.
- Wira. V & Gustati. (2014). Optimalisasi Dana Bergulir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan* Vol. 1 No. 2 hal 144-150.
- Yuliati, Sudarma, M. & Kamayanti, A. (2015). Menyibak Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BKM Bunu Rejo Kota Malang). *Jurnal InFestasi*, Vol. 11 No. 2, pp. 230-239.
- Yusrianti, H. (2011). Efektivitas Penyaluran dan Monitoring Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Palembang. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Tahun 2011 Palembang*.